

# Reintegrasi Atau Konsolidasi GAM?

**HELSINKI** menjadi saksi bisu putaran kelima perundingan RI-GAM. Bahkan menjadi saksi mnonumental ditetapkannya Nota Kesepahaman (MOU) antar kedua belah pihak pada 15 Agustus nanti. Terobosan kebutuhan yang memasuki babak baru. Empat koridor yang cukup menguntungkan Indonesia yakni masalah Aceh adalah masalah domestik, tidak ada internasionalisasi Aceh, pengakuan NKRI dan UUD 1945 serta penjabarannya didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, memaksa pihak GAM harus lebih piawai lagi memainkan kartu truf agar misi perjuangan mereka terselamatkan. Memecah kebutuhan GAM pun secara sporadis tampil dengan usulan partai politik lokal.

Meleuplah partai politik lokal menjadi wacana publik yang menghipnotis. Belum juga juru runding pulang, semua pihak lekas merespon dengan segala kekuatan plus-minusnya. Ada yang bilang UU No.31/2002 tentang Partai Politik harus cepat diamandemen, parpol lokal kenisycayaan sejarah, menstimulasi efek domino hingga parpol lokal dinilai instrumen kompromistis yang temurrah.

Opini berseberangan, nyaris hanya lantang disuarakan PDIP. Bukan substansinya yang dipersoalkan, tetapi mekanisme perundingan. Dikatakan informal tapi keputusannya mengikat seluruh bangsa. Ada ketidakpatuhan prosedur konstitusional (Kompas 25/7).

**Integrasi Baru**  
Muncul pertanyaan, cukup signifikanakah 30 tahun konflik berdarah dikonversi hanya dengan terkabulnya usulan pendirian parpol lokal di Aceh? Telah begitu lemahkah spirit ideologis dan obsesi kemerdekaan Aceh Sumatera yang telah diproklamirkan 4 Desember 1976 tersebut? Dimana pula berlabuhnya jiwa militansi orang Aceh yang

telah gagah perkasa mengusir Portugis tahun 1520-an dan Belanda (1873-1913)? Dan sederet nada gugat yang lain.  
Meragukan bahwa semua pertanyaan tersebut tak bakal memperoleh jawaban yang tegas, muncul kekawatiran GAM sedang memasangkan strategi apa lagi? Kekuatiran ini wajar. Beberapa kali sudah, ketulusan RI untuk berdamai dengan anak bangsanya dinodai. Nota 'Saling Pengertian Bagi Jeda Kemanusiaan untuk Aceh' yang ditandatangani di Jenewa Mei 2000 ternyata tak banyak manfaatnya.

Jeda konflik justru diisi dengan saling baku tembak. Begitu pula tawaran otonomi khusus, malah direspon sebaliknya. Terus masuk pengusiran warga transmigran Jawa dari bumi rengcong. Belum cukup sampai di situ baru tiga minggu se usai penanda-tanganan "The Cessation of Hostilities Agreement (COHA)" tanggal 9 Desember 2002 sudah terjadi 50 insiden yang merugikan RI.

Bahkan Komite Keamanan Bersama (JSC) yang dipimpin oleh Mayjen Thanyung Tuvinan dari Thailand dan wakiltanya Brigjen Nogomora Lomodag dari Filipina yang bertugas untuk memantau pelaksanaan perjanjian itu pun tak bisa berbuat banyak. Bercermin atas beberapa fakta empirik

## Gatut Priyowidodo\*

tersebut, wajar kiranya mempertanyakan jalan peta damai ini sungguhan atau bagian dari strategi implementasi "hidden agenda" GAM? Karena penyebab konflik Aceh itu sendiri tidak tunggal. Menurut Staffan Bodemar (Conflict in Aceh, Maret 2004)

sekurangnya ada tiga sebab utama yakni harapan otonomi yang lebih luas, besarnya skala pelanggaran HAM dan faktor sosial ekonomi termasuk korupsi.

Jika nyatanya GAM berpikir bahwa ikut Republik jauh lebih baik, tentu saja hasil perundingan Helsinki ini menjadi pintu masuk reintegrasi sebagian anak bangsa untuk merajut masa

depan yang lebih baik. Tragedi tsunami kiranya turut menjadi momentum kontemplasi paling historis bahwa bersatu itu tetap lebih baik.

**Konsolidasi GAM**  
Postulasi klasik partai politik adalah kekuasaan. Hampir tak ada partai politik didiriknkan tanpa berorientasi kekuasaan. Sementara muara kekuasaan adalah dominasi birokrasi. Melalui penguasaan birokrasi lokal diharapkan bakal mempermudah terjadinya konsolidasi organisasi. Tak-tik perjuangan ini juga selaras dengan implementasi otonomi khusus Aceh.

Maka, Jakarta harus lebih seksama

melihat perkembangan di lapangan. Konversi bahwa setiap penarikan 50 ribu pasukan TNI akan diimbangi dengan penyerahan 5000 pucuk senjata militasi, pengakuan GAM bahwa Aceh bagian dari NKRI dan tidak menuntut referendum, mesti hati-hati disikapi. Adakah jaminan yang bisa dipertaruhkan? Pemerintah harus tegas dan jelas mendudukkan soal ini, agar kelak tidak terjadi kerumitan baru.

Tentang persyaratan diberi keleluasaan pemantau Uni Eropa dan media asing meliput untuk apa? Jika GAM sudah mengakui NKRI, Aceh adalah integral bagian Indonesia. Maka, percayalah pemerintah Indonesia juga akan berpikir untuk memakmurkan Aceh, sama derajatnya dengan upaya pemerintah memakmurkan daerah-daerah lain.

Jika rakyat bumi Rengcong banyak yang miskin, terbelakang di daerah lainpun hal serupa masih banyak ditemukan. Aceh tidak sendiri. Maka jika kebobrokan seperti itu harus diketahui pihak luar sebagai tidak adanya perhatian pihak Indonesia pasca kesepakatan damai rasanya juga tidak adil.

Terobosan damai konflik Aceh, harus ditempatkan dalam perspektif yang holistik dan komprehensif.

Berlakunya otonomi khusus, syariat Islam dan tuntutan parpol lokal yang berbasis di Aceh kiranya disemangati kerinduan bersama untuk menciptakan rasa damai yang permanen.

Jangan sampai justru setelah partai lokal dibentuk, birokrasi kabupaten/kota dikuasai. Jaringan GAM semakin terkonsolidasi, tuntutan proklamasi Aceh merdeka dikumandangkan lagi. Jika itu yang terjadi TNI tidak ada pilihan lain kecuali berkata, game is over bung. Let's play the gun....

\*Penulis adalah dosen FISIPOL Univ. Ekasakti dan Direktur Humanity and Social Community Studies (HSCS) Padang.